

SYSTEM DEVELOPMENT INFORMATION WORKSHEET EMPLOYEE (e-LKP) IN THE MINISTRY OF WORK HOUSING AND PUBLICMuhammad Tahir ¹, Bambang Gunawan ²
Universitas Gunadarma ^{1,2}
tahirlubis8@gmail.com

Abstrak – Menyikapi perubahan birograsi di Indonesia untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat luas, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi untuk mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai di instansi pemerintahan, Bidang Pemantauan Kinerja Pegawai Unit Kerja X, telah mengembangkan aplikasi manajemen ASN yang terkait kinerja pegawai, Sistem Informasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Multi Rating 360' yang digunakan untuk menilai perilaku atasan, rekan sejawan dan bawahan dan e-LKP sebagai pendukung utama bagi berjalannya aplikasi e-Kinerja untuk menunjang karir pegawai. Pengembangan sistem informasi LKP menggunakan siklus pengembangan SDLC (*System Development Life Cycle*), dengan model evolusioner yaitu Incremental Model. dengan mengakomodir peraturan yang ada, berdasarkan fungsi dan kebutuhan. Sistem di buat berbasis Web, untuk mempermudah akses aplikasi oleh pengguna, sehingga monitoring, rekomendasi, proses penilaian dan pelaporan pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, tepat dan transparan, secara tidak langsung membantu proses percepatan reformasi birograsi di instansi pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci : Birograsi, Sistem Informasi, LKP, ASN;

Abstract - Responding to changes in bureaucracy in Indonesia to support the service process to the wider community, high competence Human Resources (HR) are needed to support the improvement of employee performance in government agencies, Work Unit X Employee Performance Monitoring Division, has developed an ASN management application which related to employee performance, the Employee Work Target Information System (SKP), Multi Rating 360 'which is used to assess the behavior of superiors, peers and subordinates and e-LKP as the main support for running the e-Kinerja application to support employee careers. The development of the LKP information system uses the SDLC (*System Development Life Cycle*) development system, with an evolutionary model, namely the Incremental Model. by accommodating existing regulations, based on functions and needs. The system is made Web-based, to facilitate access to applications by users, so that monitoring, recommendations, appraisal processes and work reporting become faster, more accurate, precise and transparent, indirectly helping the process of accelerating bureaucratic reform in Indonesian government agencies.

Keywords: Biorgration, Information Systems, LKP, ASN;

1. Latar Belakang

Dalam rangka proses Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Indonesia maka presiden mengeluarkan intruksi Presiden tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* yang diharapkan setiap instansi pemerintahan telah menerapkan *e-government* dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, Instansi Pemerintah yang termasuk di dalam Peraturan.

Penilaian kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang meliputi aspek kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Format DP3 tersebut kurang fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter khusus yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lainnya. juga rentan dengan terjadinya bias subyektifitas

(penafsiran prasangka). Apalagi hasil penilaian tersebut tidak pernah didiskusikan atau dievaluasi bersama untuk mendapatkan feedback (umpan-balik) dari pegawai yang dinilai, sehingga penilaian DP3 tidak memotivasi PNS dalam bekerja serta tidak berpengaruh pada kinerja.

Menyusul reformasi politik yang terjadi di Indonesia, birokrasi tata kelola negara mengalami pembenahan untuk mengatasi *inefisiensi* (pemborosan) birokrasi. Pembenahan itu juga dilakukan salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berupaya mendorong percepatan dan perbaikan kualitas aparatur sipil negara [1]. Sebelumnya telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih mengutamakan capaian kinerja PNS yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai SKP dan penilaian terhadap

Prilaku Kerja PNS. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja dengan memperhatikan perjanjian kinerja di awal masa jabatannya atau secara periodik setiap awal tahun pada jabatan yang sama [2]. Pada prinsipnya, target di breakdown (perincian) dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki (terstruktur) sesuai kesepakatan pimpinan pada masing-masing unit kerja. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu pemantauan (monitoring), SKP yang telah ditetapkan pada awal tahun dimonitor pencapaiannya secara terus-menerus untuk memastikan pencapaian target kinerja. Ada kalanya perlu diberikan feedback, coaching dan konseling, ataupun tindakan disiplin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

Untuk mendukung manajemen PNS bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki sistem informasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sehubungan dengan itu Instansi Pemerintah Unit Kerja X telah membuat dan mengembangkan aplikasi manajemen ASN yang terkait kinerja. Aplikasi itu adalah e-Lembar Kerja Pegawai (e-LKP) sebagai pendukung utama bagi berjalannya aplikasi e-Kinerja, Aplikasi e-LKP yang merupakan pendukung utama bagi berjalannya aplikasi e-Kinerja, semua hasil kerja seorang pegawai tercatat sebagai bukti bagi penilaian dan yang dinilai, serta melaporkan seluruh pekerjaan yang akan menjadi dasar penilaian SKP. Dalam pelaksanaannya, inventarisasi dokumen SKP maupun hasil penilaiannya membutuhkan waktu lama karena masih banyak pejabat dan pegawai yang kurang memahami akan pentingnya dokumen SKP bagi peningkatan karier ke depannya dan rentan waktu pelaporan 1 (satu) tahun, sehingga banyak yang menyerahkan dokumen SKP melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena tidak adanya evaluasi progress bulanan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka dalam penelitian dibahas tentang pengembangan sistem informasi lembar kerja pegawai (e-LKP) sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. sehingga diharapkan proses penilaian prestasi kerja sebagai acuan kinerja seorang pegawai bisa dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan transparan, yang secara tidak langsung juga membantu proses percepatan reformasi birokrasi di instansi pemerintahan. Dengan

pengembangan sistem informasi e-LKP dalam progress bulanan secara elektronik ini, maka diharapkan setiap PNS dapat bekerja sama untuk menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja secara tepat waktu agar pelaporan kinerja secara elektronik dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

2. Kajian Pustaka

Penggajian Berbasis Kinerja di Sekretariat Pemerintah Kota Surabaya melalui Program e-performance dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hasil penelitian menunjukkan, penerapan remunerasi berbasis kinerja di Kota Surabaya Sekretariat Pemerintah melalui program e-Kinerja berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini terbukti dari meningkatnya dampak kinerja karyawan dan peningkatan disiplin pegawai. Namun, banyak penilaian yang ada dalam e-Kinerja dan kegiatan perekaman dalam e-Kinerja harus dievaluasi lebih lanjut [3].

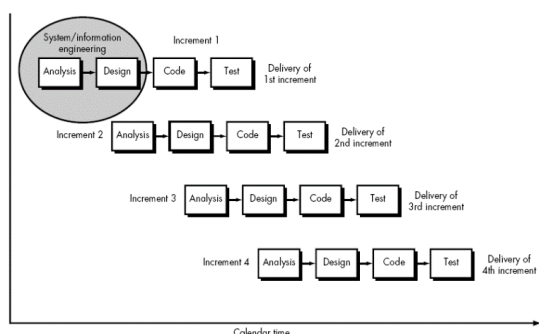
Efektivitas Penerapan Sistem E-Performance Di Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem e-performance di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang mengacu pada 5 (lima) aspek penilaian e-performance yaitu kualitas, kuantitas, efektivitas waktu, efisiensi biaya dan perilaku kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem e-performance di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif E-performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai yang lebih obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai, berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Pada dasarnya pembangunan e-government tidak lepas dari ketersediaan teknologi informasi yang memadai karena teknologi merupakan komponen utama dalam menggerakkan konsep e-government disamping ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya finansial sebagai komponen penunjangnya [4].

3. Perancangan Sistem / Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari pengamatan data-data yang ada, tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk membangun sistem informasi LKP di Unit Kerja Bidang Pemantauan Kinerja Pegawai, Pusat I, Unit Organisasi Unit Kerja X yang khusus menangani penilaian kerja

pegawai di Instansi Pemerintah, menggunakan siklus pengembangan SDLC (System Development Life Cycle), dengan model evolusioner yaitu Incremental Model. suatu pendekatan analisis dan desain sistem yang terdiri dari beberapa kali iterasi sampai sistem tersebut selesai sepenuhnya [5].



Gambar 1. Model Incremental [6]

Pembangunan sistem Model Incremental dipecah menjadi beberapa modul aplikasi berdasarkan fungsinya dan kebutuhan user dimana setiap modul mempunyai tahapan proses dan mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel.

Prinsip kerja sistem dimulai dari Studi Literatur dengan mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan, yaitu mencari faktor-faktor yang menjadi syarat Sistem informasi (SI), mencari sumber-sumber efektif informasi mengenai pembangunan Sistem Informasi LKP di instansi lain dan regulasi-regulasi yang terkait dalam menyusun laporan bulanan SKP. Pada tahap ini dilakukan pencarian literatur berupa buku, jurnal, artikel dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil dari studi literatur dan observasi ditemukan informasi-informasi akurat yang dibutuhkan untuk pembangunan Sistem Informasi e-LKP seperti data-data indikator yang menjadi ukuran penilaian SKP, teknis penyusunan format laporan bulanan SKP, serta memahami regulasi SKP pada PP dan perka BKN, yang nantinya akan divalidasikan ke dalam sistem. Pembangunan sistem ini dibangun dengan incremental Model.

Tahap selanjutnya hasil dari pengembangan perangkat lunak dilakukan pengujian Sistem oleh pengguna (user) di Instansi Pemerintah dengan cara mengoperasikan sistem secara berulang ulang. Tahap selanjutnya setelah hasil pengujian sistem dinyatakan sudah valid atau outputnya sesuai apa yang diharapkan, maka segera sistem ini diimplementasikan oleh pengguna (user) di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Implementasi Sistem dan Hasil

Menganalisis solusi dari masalah lembar kerja pegawai, tanpa menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dan yang terinteraksi akan mengalami kesulitan, sehingga sangat diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mengatasi masalah tersebut dan membantu user yang dinilai (bawahan) dan user penilai (atasan) untuk menyusun laporan kegiatan uraian tugas dengan benar. Sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN di lingkungan kerja dan data-data yang dimasukkan dapat di informasikan dengan baik, akurat, terpelihara dan terintegrasi dengan database yang lain.

Pada sistem informasi LKP yang di usulkan ada dua (2) user sistem yaitu: 1) User Pimpinan yang memiliki navigasi akses sebagai user sendiri yang akan dinilai untuk membuat laporan penyusunan LKP, menilai bawahannya dan bisa sebagai perwakilan user untuk mewakili user lain dalam mengisi uraian kegiatan tugas target dan realisasi. 2) User Staf atau Pegawai bawahan memiliki navigasi akses sebagai user sendiri yang akan dinilai untuk membuat laporan penyusunan LKP. Tabel 1 dibawah ini menggambarkan perbandingan penyusunan sistem informasi LKP yang berjalan dengan penyusunan sistem informasi LKP menggunakan sistem informasi yang dikembangkan.

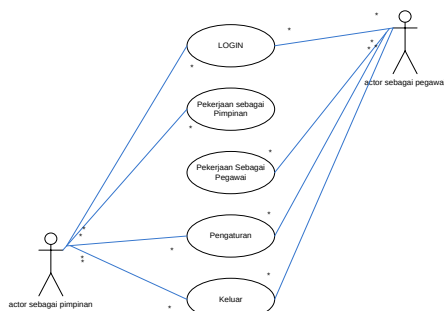
Table 1 Perbandingan penyusunan e-LKP

NO	Penyusunan e-LKP yang Berjalan.	Penyusunan e-LKP Menggunakan Sistem Informasi yang di Kembangkan
1	Pekerjaan baru dibuat di aplikasi lain dan data disimpan secara terpisah.	Punya database untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang telah di selesaikan.
2	Cetak rekap nilai pekerjaan pegawai untuk kebutuhan sistem lain.	Terintegrasi dengan sistem informasi yang membutuhkan informasi nilai pegawai.
3	Pimpinan tidak bisa memonitoring pekerjaan pegawai atau bawahan.	Pimpinan bisa memonitoring pekerjaan pegawai bawahannya, serta usulan terkait pekerjaan.
4	Belum mempunyai konten dialog untuk mempermudah komunikasi anatar pimpinan dan bawahan.	Memasukkan konten dialog di dalam kolom perencanaan pekerjaan untuk mempermudah komunikasi anatar pimpinan dan bawahan.
5	Rencana kerja dibuat diawal tahun atau akhir tahun oleh pimpinan dan bawahan.	Menggunakan monitoring disposisi pekerjaan, untuk memberi tugas baru yang perlu dikerjakan.

Dari analisis sistem yang berjalan dan beberapa usulan yang menjadi solusi untuk menjawab masalah yang telah diuraikan, solusi yang ditawarkan memiliki tujuan yang dapat dilakukan dengan perancangan sistem informasi LKP dengan aspek dan metode yang berlaku. Perancangan tersebut meliputi: merancang tampilan user, merancang basis data untuk sistem tersebut agar manajemen file yang ada lebih teratur, selanjutnya hasil perancangan sistem diteruskan ke bagian pemrograman untuk diimplementasikan ke dalam sistem komputer. Dengan model Perancangan Sistem Unified Modelling Language (UML).

a. Use Case Diagram

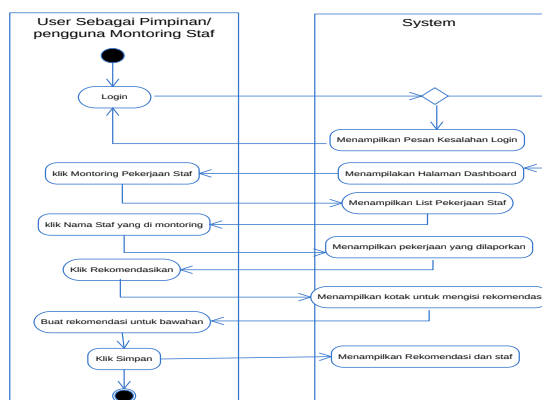
Use case adalah sebuah alat bantu guna menstimulasi pengguna untuk memetakan suatu sistem dari sudut pandangnya, berikut ini adalah use case diagram sistem informasi e-LKP.



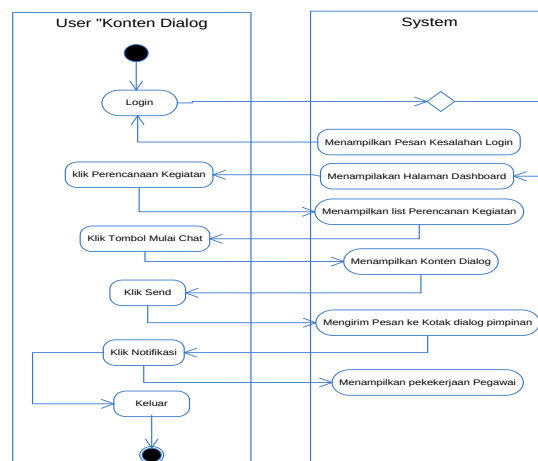
Gamabar 2. Use Case Actor

b. Acti vity Diagram

Diagram aktivitas yang terbentuk dari kegiatan bisnis dan Use cas diagram yang ada pada sistem informasi e-LKP yang diusulkan.



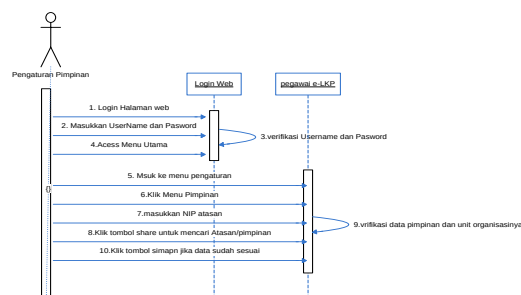
Gamabar 3. Activity Diagram Montoring



Gamabar 3. Activity Diagram Konten Dialog

c. Sequence Diagram

Sequence diagram secara garis besar menggambarkan bagaimana objek berintegrasi dengan satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah user case atau operasi. diagram ini mengilustrasikan bagaimana pesan terkirim dan diterima diantara objek [7].

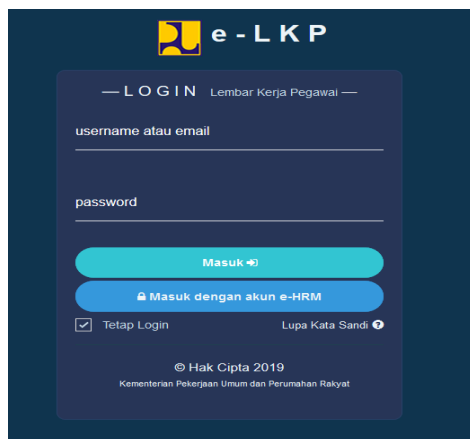


Gambar 4. Penagaturan Pimpinan user pegawai

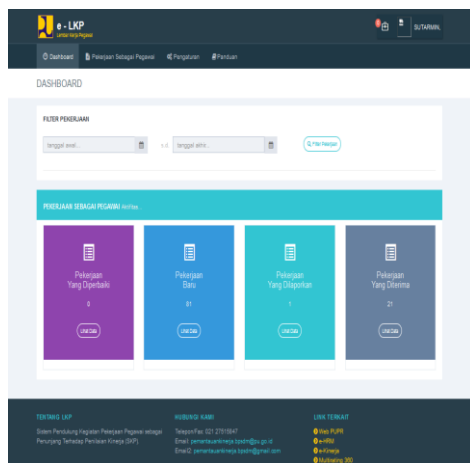
Dalam mengimplementasikan pengembangan yang dibangun sebelumnya ke dalam sistem komputer. yaitu dengan menggunakan salah satu perangkat lunak bahasa pemrograman yang dikenali oleh mesin komputer, dalam hal ini menggunakan metode OOP (Objek Oriented Programmig), dengan membagi tiga elemen yaitu dengan menggunakan konsep arsitektur aplikasi MVC (Model, View, Controller), dimana arsitektur MVC membagi menjadi 3 bagian besar dan kemudian membuat interaksi antara ketiganya.

d. View

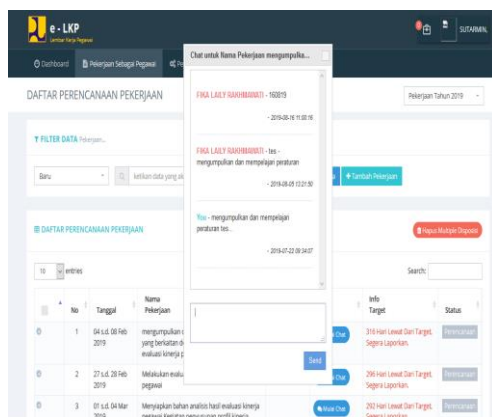
Bagian view merupakan interface yang menyediakan halaman untuk kebutuhan-kebutuhan informasi dan transaksi data yang di perlukan user, dengan pengembangannya menggunakan fasilitas fungsi, yang terdiri dari beberapa tampilan halaman diantaranya yaitu.



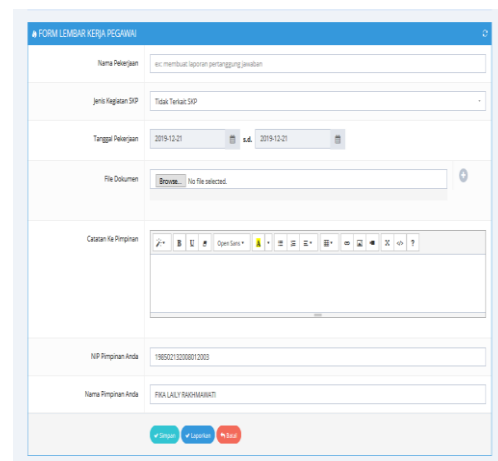
Gambar 5. Tampilan Login



Gambar 6. Tampilan Deasboard



Gambar 7. Tampilan Chat/Dialog Pegawai



Gambar 8. Tampilan Halaman Kerja Baru

a. contoh isi

Menyajikan hasil riset, akurasi yang dapat dicapai, signifikansi langkah maupun pengetahuan, fenomena, maupun informasi yang dapat diberitahukan kepada khalayak. Termasuk di dalamnya sumbangan baru yang dihasilkan dalam riset. Analisis yang rinci dan mengkerucut sangatlah bermanfaat bagi peneliti lain.

5. Kesimpulan

Dengan adanya sistem LKP dapat mempermudah pekerjaan ASN, seorang pimpinan dengan mudah memonitoring pekerjaan bawahannya, merekomendasikan atau memberi pekerjaan baru dan langsung memberikan nilai tugas kepada pekerjaan pegawai bawahannya, dapat mempermudah pegawai bawahan untuk mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan pimpinan, memperbaiki kesalahan dalam pekerjaan yang mendapat revisi dari pimpinan serta melaporkan pekerjaan dengan tepat pada waktu yang sudah ditentukan pimpinan. maka sistem informasi LKP bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam instansi Pemerintahan Unit Kerja X dan menunjang karir pegawainya.

Sistem informasi LKP yang dibuat menyediakan *from messenger* atau konten dialog untuk komunikasi antara pimpinan dan bawahannya untuk mendiskusikan pekerjaan. Konten dialog hanya bisa digunakan antara pimpinan dan bawahan saja dan belum menyediakan untuk konten grup serta pesan video dan panggilan video. untuk pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya database dalam unit organisasi Pemerintahan Unit Kerja X, harus selalu diupdate untuk menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan baik dari segi kualitas data maupun kuantitasnya.

6. Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- [3] Damayanti, Sellaganjis. 2014. "Penggajian Berbasis Kinerja Di Sekretariat Pemerintah Kota Surabaya Melalui Program E-Performance Dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)." 2:1–10.
- [4] Bachtiar, Aditya Rahmat. 2013. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Performance Di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya." 1–12.
- [5] Whitten dan Bantley, (2007), System Analysis and Design for The Global Enterprise Sevent Edition, New York: Mc Grow-Hill.
- [6] Pressman, Roger. 2005. Software Engineering: A Practitioner's Approach. New York : McGraw-Hill.
- [7] Jeffery L. Whitten, L. D. 2004. Metode Desain & Analisis Sistem. Yogyakarta: Andi.